



► RENCANA PEMBANGUNAN

Sampah dan Ketimpangan Ekonomi Jadi PR Pemkot

Pengelolaan sampah dan ketimpangan ekonomi menjadi isu yang perlu dicermati dan ditanggulangi Pemkot Jogja pada 2025. Keduanya menjadi bagian dari isu strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 Pemkot Jogja yang digelar di Ruang Yudhistira kompleks Balai Kota Jogja, Kamis (21/3)



Suasana RKPD Pemkot Jogja di Ruang Yudhistira, kompleks Balai Kota Jogja, Kamis (21/3).

Harian Jogja
 redaksi@harianjogja.com

Penjabat Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo menjelaskan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah Kota Jogja sebagai Kota Berpendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan Hidup.

Adapun tema pembangunan 2025 yang diturunkan dari RPJPD 2005-2025 yakni *Pemantapan Pembangunan Marusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Maka, visi dan tema ini yang harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD 2025.

Dalam penyusunan RKPD 2025 ini, Pemkot telah memetakan sejumlah isu strategis, salah satunya pengelolaan sampah. "Pemkot menghitung hari menuju desentralisasi, dan terus berproses baik hulu dan hilir. Saya terus mengingatkan, baik di wilayah maupun organisasi perangkat daerah [OPD], agar betul-betul

► **Pemkot menghitung hari menuju desentralisasi, dan terus berproses baik hulu dan hilir.**

► **Singgih mengakui *gini ratio* atau ketimpangan ekonomi Kota Jogja masih cukup tinggi.**

bisa mengolah sampah yang mencapai 200 ton per hari," katanya.

Selain itu, jaminan pembangunan berkelanjutan terhadap generasi ke depan juga menjadi perhatian. Isu lain yang tak kalah penting yakni penurunan angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat. "Harus tepat tuju, tepat sasaran, tepat mutu. Semua harus digerakkan. Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang belum tersentuh program pembangunan," katanya.

Singgih mengakui *gini ratio* atau ketimpangan ekonomi Kota Jogja masih cukup tinggi. Dari data BPS, *gini ratio* Kota Jogja 2023 sebesar 0,454. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,519. "*Gini ratio* masih tinggi,

itu yang harus didekatkan [ketimpangan ekonomi]," ujarnya.

Kepala Bappeda Kota Jogja, Agus Tri Haryono menuturkan peningkatan perekonomian harus bersifat inklusif dan berkelanjutan yang afirmasi pada kelompok rentan. "Meningkatnya perekonomian diharapkan dapat dinikmati semua kelompok masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesenjangan. Ini sejalan dengan isu penurunan kemiskinan. Baru dirilis, kemiskinan ekstrem 2022 di 0,67 atau kurang lebih 3.010, kemudian 2023 menjadi 0,50 atau 2.260," kata dia.

Sementara, Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudyatmoko menuturkan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Jogja adalah inflasi daerah. Ia melihat saat ini kebutuhan pokok meski ketersediaannya mencukupi, namun harganya sangat tinggi. Soal inflasi ini menurutnya bisa menjadi proyeksi untuk 2025, bagaimana agar lebih terkendali dan tidak memberatkan masyarakat. "Kalau ditemukan angka itu, ini menjadi proyeksi untuk 2025. Supaya lebih diantisipasi supaya gejala ini tidak meruntuhkan sendi kehidupan masyarakat," katanya. (Lugas Subarkah/*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Desember 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005